

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Strategis Pemerintah Daerah | Indikator Kinerja | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | |
|----|--|-------------------------------|---------|--|---|--------|----------------------|------------------|----------|------|------------------|--|
| | | | No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi {%) | Program | Pagu | Realisasi {%) | |
| 1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Indeks Reformasi Birokrasi | 1 | Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Levelling Kapabilitas APIP /(Internal Audit Capacity Models/IACM) | Level | 3 | n/a | 0.00 | | | |
| | | | | | Indeks Penerapan Manajemen Resiko | Indeks | 3 | n/a | 0.00 | | | |

| No | Sasaran Strategis Pemerintah Daerah | Indikator Kinerja | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--|--------|-------------------|-----------|----------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Program | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 2 | Meningkatnya efektivitas pengawasan | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 3 | n/a | 0.00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 10.460.000 | 9.913.870 | 94.78 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 12.310.000 | 11.792.100 | 95.79 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 34.995.040 | 30.027.700 | 85.81 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.661.000 | 2.521.700 | 94.77 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 73.609.480 | 53.613.000 | 72.83 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 153.682.200 | 150.822.400 | 98.14 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 79.983.640 | 66.405.240 | 83.02 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.661.000 | 2.521.700 | 94.77 |

| No | Sasaran Strategis Pemerintah Daerah | Indikator Kinerja | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---|-------------------|---------|---|---|--------|----------------------|-----------|----------|---|------------|------------|-------|
| | | | No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Program | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 27.027.050 | 23.905.850 | 88.45 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 24.294.700 | 21.635.000 | 89.05 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 36.835.040 | 33.161.500 | 90.03 |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.851.000 | 1.725.300 | 93.21 |
| | | | 3 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik | Nilai kematangan organisasi Inspektorat | Nilai | 43 | 47 | 109.30 | | | | |

| No | Sasaran Strategis Pemerintah Daerah | Indikator Kinerja | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------|--------|-------------------|---|---------------|---------------|-------|-----------|
| | | | No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Program | Pagu | Realisasi |
| | | 4 Meningkatnya kinerja Inspektorat | Nilai SAKIP Inspektorat | Nilai | 83 | 80.25 | 96.69 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.284.534.412 | 6.785.112.804 | 81.90 | |
| | | | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat | Indeks | 88.5 | n/a | 0.00 | | | | | |
| | | | Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan | Orang/tahun | 4 | 4 | 100.00 | | | | | |
| | | | Jumlah Inovasi Inspektorat | Buah | 1 | 1 | 0.00 | | | | | |
| | | | IKM Inspektorat | Indeks | 86 | 86.32 | 100.37 | | | | | |

B. FAKTOR PENDUKUNG

1. Kapabilitas APP

Masih dalam proses penilaian oleh BPKP atas Kapabilitas APIP dan belum terbit hasilnya di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan Penilaian Mandirinya telah disiapkan sejak Triwulan I seperti pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektoral atas Ketahanan Pangan yang sudah dimulai persiapan pengawasannya di Triwulan I 2025 yang akan digunakan sebagai sampel dalam penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 terkait audit kinerja. Kemudian rapat internal terkait realisasi renaksi tindak lanjut hasil penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 sebagai pertimbangan nilai di penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 yang juga telah di laksanakan di Triwulan I Tahun 2025. Kemudian di Triwulan II telah dibentuk Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektor Nomor 38 Tahun 2025, tanggal 4 Juni 2025.

2. Indeks Manajemen Risiko

Masih dalam proses penilaian oleh BPKP atas Manajemen Risiko dan belum terbit hasilnya di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan penilaian mandirinya telah disiapkan sejak awal tahun seperti evaluasi atas penyusunan register risiko dan dokumen RTP tahun 2025 serta monitoring implementasi RTP Tahun 2024. Kemudian penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang SPIP yang telah disosialisasikan di Triwulan II untuk membantu kelancaran dalam Penilaian Mandiri SPIP yang telah dilaksanakan di Triwulan II antara Bulan Juni 2025 oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri telah dilaksanakan oleh Tim Penjamin Kualitas Kabupaten Wonogiri di akhir Bulan Juni 2025. Selain itu, telah dilakukan rapat dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian tahun sebelumnya.

Level Maturitas SPIP

Masih dalam proses penilaian oleh BPKP atas Level Maturitas SPIP dan belum terbit hasilnya di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan penilaian mandirinya telah disiapkan sejak awal tahun seperti evaluasi atas penyusunan register risiko dan dokumen RTP tahun 2025 serta monitoring implementasi RTP Tahun 2024. Kemudian penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang SPIP yang telah disosialisasikan di Triwulan II untuk membantu kelancaran dalam Penilaian Mandiri SPIP yang telah dilaksanakan di Triwulan II antara Bulan Juni 2025 oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri telah dilaksanakan oleh Tim Penjamin Kualitas Kabupaten Wonogiri di akhir Bulan Juni 2025. Selain itu, telah dilakukan rapat dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian tahun sebelumnya.

Nilai Kematangan Organisasi

Telah dilakukan persiapan dalam pencapaian target kinerja atas kematangan organisasi dengan melakukan evaluasi atas penilaian kematangan organisasi sebelumnya dan melakukan peningkatan nilai pada variabel yang nilainya masih kurang sehingga terjadi peningkatan yang cukup besar dari awalnya 38 di tahun 2024 menjadi 47 di tahun 2025 atas nilai kematangan organisasi.

Indikator sasaran yang telah terealisasi dengan capaian 100% pada :

1. Jumlah ASN Inspektorat yang Menjadi Agen Perubahan

Telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektor untuk ASN yang akan menjadi agen perubahan di Triwulan II sesuai koordinasi dan rapat internal yang telah dilakukan di Triwulan I dengan 3 Agen Perubahan dari tahun sebelumnya dan penambahan 1 Agen Perubahan baru di tahun 2025. Kemudian di Triwulan II telah ditetapkan rencana aksi atas perubahan yang akan dilakukan oleh semua agen perubahan untuk kemudian direalisasikan di Triwulan III dan disusun laporannya di Triwulan IV.

2. Jumlah Inovasi Inspektorat

Sesuai renstra tidak ditetapkan inovasi di Inspektorat untuk tahun 2025, namun telah dilakukan perubahan PK untuk ditargetkan 1 inovasi dan sudah di daftarkan di Gerbang Indah Wonogiri di Triwulan II dan telah muncul hasilnya di Triwulan IV.

3. Jumlah Inovasi Inspektorat

Telah tercapai sesuai rencana targetnya dengan mendaftarkan inovasi di Gerbang Indah Wonogiri terkait inovasi digital library sebagai Wadah Dokumen Regulasi dan Referensi untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan Intern di Inspektorat.

4. IKM Inspektorat

Penilaian dilaksanakan di Triwulan IV. Namun, proses pengumpulan data survey telah dipersiapkan dan diedarkan ke pengguna layanan di Inspektorat sejak Triwulan I hingga Triwulan II. Kemudian telah dilakukan juga Forum Group Discussion di Triwulan IV setelah penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di triwulan IV. Berdasarkan proses tersebut dari targetnya 86 diperoleh hasil 86,32.

Kemudian beberapa target atas indikator sasaran belum tersedia hasilnya di Triwulan IV sehingga untuk realisasinya juga masih n/a, namun beberapa telah berjalan proses yang mendukung dalam pencapaian targetnya seperti :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Hasil penilaian akan terbit di akhir tahun setiap tahunnya sehingga belum muncul target dan realisasinya di Triwulan IV. Namun data pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian telah dipersiapkan sejak Triwulan I seperti penyusunan rencana pendidikan pelatihan untuk penilaian IPASN yang dilanjutkan pendataan atas pegawai yang telah mengikuti diklat, seminar ataupun workshop dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Kapabilitas APIP

Terjadi perubahan regulasi di Triwulan IV terkait penilaian Kapabilitas APIP sehingga hasil atas penilaian kemungkinan mundur dari yang dijadwalkan dan mengalami penurunan nilai karena langkah strategi yang diambil sudah tidak relevan dengan perubahan regulasi yang baru dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

Indeks Manajemen Risiko

Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan RR dan RTP namun masih banyak Perangkat Daerah yang belum mampu mengidentifikasi risiko dengan tepat sehingga berdampak terhadap rencana pengendaliannya yang belum sesuai

Level Maturitas SPIP

Belum terdapat hambatan yang krusial dalam mendukung proses penilaian mandiri Maturitas SPIP dan penjaminan kualitasnya

Nilai Kematangan Organisasi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam pencapaian target nilai kematangan organisasi karena telah dilakukan persiapan untuk perbaikannya berdasarkan evaluasi penilaian tahun sebelumnya.

Tidak ada hambatan yang berisiko menghambat pencapaian target di Triwulan IV karena semua berjalan masih dalam proses. Hanya saja untuk Penilaian AKIP yang telah terealisasi dengan nilai 80,25 jika dibandingkan dengan targetnya di Triwulan II dengan target 83 maka simpulannya adalah belum dapat tercapai untuk capaian kinerjanya atas Penilaian AKIP Inspektorat. Hal ini disebabkan oleh perubahan cara penilaian AKIP yang lebih kompleks dan penetapan target di Renstra yang terlalu tinggi karena masih mendasarkan pada pencapaian atas cara penilaian AKIP yang lama sehingga mengakibatkan target atas AKIP dan IPASN tidak pernah tercapai yang tentunya mempengaruhi dalam penilaian evaluasi AKIP setiap tahunnya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kapabilitas APIP

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah menelaah aturan baru dalam penilaian Kapabilitas APIP dan menyusun strategi dalam pencapaian targetnya di tahun 2026 sambil menunggu hasil realisasi di tahun 2025 untuk dilakukan evaluasi.

Indeks Manajemen Risiko

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan evaluasi atas dokumen RR RTP Perangkat Daerah agar dapat disosialisasikan strategi perbaikannya dalam sosialisasi SPIP setiap tahunnya yang rencana pelaksanaannya biasanya di triwulan I.

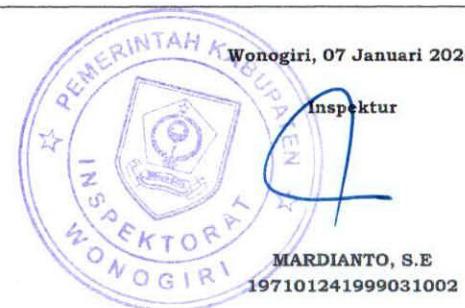
Level Maturitas SPIP

Hasil atas level maturitas SPIP belum terbit hingga akhir Desember 2025 sehingga belum ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan tindak lanjutnya menunggu hasil laporan atas maturitas SPIP dari BPKP untuk kemudian dilakukan tindak lanjut rekomendasi dan evaluasi atas capaiannya untuk disusun strategi pencapaiannya di tahun berikutnya.

Nilai Kematangan Organisasi

Meskipun capaian telah melebihi rencana targetnya namun masih diperlukan pencermatan kembali untuk mempertahankan nilai yang sudah diperoleh agar di tahun 2026 tidak terjadi penurunan nilai.

Tindak lanjut atas indikator sasaran penilaian AKIP yang belum mampu mencapai targetnya adalah diperlukan pemahaman mendalam tentang perubahan metode penilaian AKIP yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi area yang terpengaruh oleh perubahan tersebut dan menyesuaikan strategi serta kebijakan Inspektorat agar lebih sesuai dengan kriteria penilaian yang baru.



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MULYANTO, S.E.
 Jabatan Pelapor : Sekretaris
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Kinerja | | | | | | | Keuangan | | | |
|----|----------------------------------|--|---------|---|---|--------|-------------------|-----------|--------|--|---------------|---------------|-------|
| | | | No | Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Program dan Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Meningkatnya kinerja Inspektorat | Nilai SAKIP Inspektorat | 1 | Terselenggaranya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah | Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah | % | 100 | 100 | 100.00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.284.534.412 | 6.785.112.804 | 81.90 |
| | | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat | 1.1 | Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | % | 100 | 100 | 100.00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.455.000 | 2.299.750 | 93.68 |
| | | Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan | 1.2 | Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun | Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun | % | 100 | 100 | 100.00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.494.023.755 | 6.098.059.942 | 81.37 |
| | | Jumlah Inovasi Inspektorat | 1.3 | Terselenggaranya administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun | Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun | % | 100 | 100 | 100.00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 999.940 | 979.100 | 97.92 |
| | | IKM Inspektorat | 1.4 | Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian | Persentase tertib administrasi kepegawaian | % | 100 | 100 | 100.00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 154.346.130 | 145.482.710 | 94.26 |
| | | | 1.5 | Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100.00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 135.313.100 | 109.705.546 | 81.08 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Kinerja | | | | | | | Keuangan | | | |
|----|-------------------|-----------|---|---|-------------------|--------|-------------------|-----------|---|----------------------|-------------|-----------|-----|
| | | | No | Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Program dan Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | 1.6 | Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah | % | 100 | 100 | 100.00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 119.685.700 | 113.140.000 | 94.53 | |
| | | 1.7 | Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100.00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 251.133.900 | 199.286.844 | 79.35 | |
| | | 1.8 | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | % | 100 | 100 | 100.00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 126.576.887 | 116.158.912 | 91.77 | |

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kerjasama seluruh pegawai di Inspektorat yang kooperatif dalam mendukung pelaksanaan aktivitas operasional rutin kantor setiap bulannya.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan data dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai rencana aksi yang telah disusun

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Ketertiban pencatatan dan monitoring atas BMD pada Inspektorat

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Ketersediaan data kepegawaian dan ketertiban pembaharuan data kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Telah terpenuhi 100% sesuai target tahunannya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya pelaksanaan jasa penunjang urusan kantor seperti pembayaran listrik, gaji pegawai kontrak serta peralatan perlengkapan kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketersediaan anggaran untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tidak ada faktor penghambat yang krusial

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Keterbatasan SDM di Inspektorat dengan PPKom dari Auditor sementara jumlah pengawasan dan aduan masyarakat yang harus ditangani semakin meningkat sehingga terjadi keterlambatan dari PPKom dalam menyusun KAK untuk pengajuan barang ke Bagian PBJ

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Wonogiri, 07 Januari 2026

Sekretaris



MULYANTO, S.E.

196806181993031010



**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

Jabatan Pelapor

: Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, S.E

Jabatan Pimpinan Pelapor

: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|--|---|------------------|-------------------|-----------|----------|--|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | 1 | Tersusunnya laporan pendampingan & Asistensi | Jumlah laporan pendampingan & Asistensi | Laporan | 5 | 5 | 100.00 | Pendampingan dan Asistensi | 21.633.700 | 19.113.300 | 88.35 |
| | | | 1.1 | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Perangkat Daerah | 53 | 53 | 100.00 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 16.635.500 | 14.498.100 | 87.15 |
| | | | 1.2 | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | 53 | 53 | 100.00 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 3.355.000 | 3.128.500 | 93.25 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | |
|----|---------------------------------------|---|---------|---|---|------------------|-------------------|---------------|--|------------|------------------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi (%) |
| | | | 1.3 | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 1 | 1 | 100.00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 300.000 | 285.700 95.23 |
| | | | 1.4 | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Perangkat Daerah | 53 | 53 | 100.00 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1.343.200 | 1.201.000 89.41 |
| 2 | Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT | Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT | 2 | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Laporan | 14 | 14 | 100.00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 17.535.040 | 16.943.500 96.63 |
| | | | 2.1 | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 1 | 100.00 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 3.230.000 | 3.200.000 99.07 |
| | | | 2.2 | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 1 | 1 | 100.00 Reviu Laporan Kinerja | 1.300.000 | 1.195.000 91.92 |
| | | | 2.3 | Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 6 | 6 | 100.00 Pengawasan Desa | 11.135.040 | 11.000.000 98.79 |
| | | | 2.4 | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Kesepakatan | 1 | 1 | 100.00 Kerjasama Pengawasan Internal | 140.000 | 88.500 63.21 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|-------------|-------------------|-----------|----------|---|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 2.5 | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 5 | 5 | 100.00 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1.730.000 | 1.460.000 | 84.39 |
| | | | 3 | Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 14 | 14 | 100.00 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 19.300.000 | 16.218.000 | 84.03 |
| | | | 3.1 | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 14 | 14 | 100.00 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 19.300.000 | 16.218.000 | 84.03 |
| 4 | Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | 4 | Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Laporan | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 1.851.000 | 1.725.300 | 93.21 |
| | | | 4.1 | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 1 | 1 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 440.000 | 380.100 | 86.39 |
| | | | 4.2 | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 1 | 1 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 1.411.000 | 1.345.200 | 95.34 |

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pendampingan dan Asistensi

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam pendampingan dan asistensi Pembangunan ZI dan Monitoring Pembangunan ZI di Triwulan I sesuai yang direncanakan sehingga dapat terealisasi sesuai targetnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan SPIP serta pelaporan monitoring LHKAN dan Evaluasi Internal RB Triwulan.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah yang baik sehingga pelaksanaan pendampingan SPIP dapat berjalan lancar dan tercapai targetnya 100% sesuai rencana dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah sehingga telah terealisasi evaluasi internal RB atas monitoring RB di Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan Triwulan I, II dan III sesuai yang telah direncanakan dalam PKPT Tahun 2025

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Komitmen perangkat daerah terkait dalam merespon positif pembangunan ZI sehingga rencana pelaksanaannya di Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sesuai tergetnya

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh perangkat daerah sehingga monitoring dan pelaporan atas LHKAN dapat terlaksana sesuai ketentuan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga telah tercapai sesuai rencana target tahunannya di Triwulan IV.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Reviu atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III dan IV sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pendampingan dan Asistensi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

-

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100%

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pendampingan dan Asistensi

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tindak lanjut di Triwulan IV adalah persiapan untuk SPIP Tahun 2026 dengan melaksanakan pendampingan dan asistensi atas penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026 pada semua perangkat daerah yang telah terlaksana sesuai rencana dan tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tiap semester atas RTP yang telah disusun tersebut

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Meskipun target telah tercapai 100% di Triwulan III namun masih dibutuhkan tindak lanjutnya di Tahun 2026 untuk melakukan monitoring RB Triwulan IV Tahun 2025

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan II sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan II sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas pengawasan desa yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan IV sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjutnya karena pelaksanaan aktivitas telah selesai di Triwulan II dan monitoring tindak lanjut rekomendasinya juga telah terselesaikan di Triwulan III

Pengawasan Desa

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi pada desa atas pengawasan desa di Bulan Desember 2025

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang di Triwulan IV dan telah terlaksana sehingga tidak ada tindak lanjutnya di tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tindak lanjutnya melakukan monitoring tindak lanjut atas aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Target telah terpenuhi 100% di Triwulan IV sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 yang telah dilaksanakan di Triwulan IV sehingga tidak ada tindak lanjutnya lagi

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian target yang telah terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Wonogiri, 07 Januari 2026

Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan



DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
197402061999032008



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M

Jabatan Pelapor

: Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, S.E

Jabatan Pimpinan Pelapor

: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------|---|--|---------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT | Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT | 1 | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Laporan | 20 | 20 | 100.00 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 19.877.050 | 18.175.850 | 91.44 |
| | | | 1.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 2 | 2 | 100.00 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 3.430.000 | 3.150.000 | 91.84 |
| | | | 1.2 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 5 | 5 | 100.00 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7.095.000 | 6.223.000 | 87.71 |
| | | | 1.3 | Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 6 | 6 | 100.00 | Reviu Laporan Kinerja | 863.200 | 765.000 | 88.62 |
| | | | 1.4 | Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Laporan | 1 | 1 | 100.00 | Reviu Laporan Keuangan | 6.258.850 | 5.895.350 | 94.19 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|-------------|-------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 1.5 | Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Kesepakatan | 1 | 1 | 100.00 | Kerjasama Pengawasan Internal | 200.000 | 142.500 | 71.25 |
| | | | 1.6 | Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 5 | 5 | 100.00 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2.030.000 | 2.000.000 | 98.52 |
| | | | 2 | Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 31 | 33 | 106.45 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 7.150.000 | 5.730.000 | 80.14 |
| | | | 2.1 | Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Laporan | 2 | 2 | 100.00 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 1.150.000 | 750.000 | 65.22 |
| | | | 2.2 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 29 | 31 | 106.90 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 6.000.000 | 4.980.000 | 83.00 |
| 3 | Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | 3 | Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Laporan | 4 | 4 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2.661.000 | 2.521.700 | 94.77 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------|---|--|-------------|-------------------|-----------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 3.1 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 550.000 | 485.100 | 88.20 |
| | | | 3.2 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 2.111.000 | 2.036.600 | 96.48 |

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga telah tercapai sesuai target tahunannya di Triwulan IV.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Koordinasi dan kerjasama yang baik dan lancar antara Inspektorat dan BPKD Kabupaten Wonogiri sehingga Rreviu atas Laporan Keuangan dapat terealisasi sesuai targetnya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Reviu atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III dan IV sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100%

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas pengawasan desa yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Aktivitas pengawasan kinerja telah terselesaikan sampai dengan Triwulan IV sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjutnya karena pelaksanaan aktivitas telah selesai di Triwulan II dan monitoring tindak lanjut rekomendasinya juga telah terselesaikan di Triwulan III

Reviu Laporan Keuangan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan I sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tindak lanjut hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanakan reviu/telaah intern antar bidang dan telah dilaksanakan di Triwulan III dan tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan monitoring tas rekomendasi/ catatan hasil telaah intern pada bidang terkait yang juga sudah terlaksana sehingga tidak ada tindak lanjutnya lagi

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelesaian target yang telah terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tindak lanjutnya melakukan monitoring tindak lanjut atas aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelesaian target yang telah terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan tidak ada lagi tindak lanjutnya di tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang telah terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai melebihi target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan sudah tidak ada tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 telah dilaksanakan di Triwulan IV dan sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Wonogiri, 07 Januari 2026

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008



MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: SARDJITO, S.Sos.M.H

Jabatan Pelapor

: Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, S.E

Jabatan Pimpinan Pelapor

: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------|--|---|-------------|-------------------|-----------|----------|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT | Percentase realisasi pengawasan sesuai PKPT | 1 | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Laporan | 27 | 27 | 100.00 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 48.541.440 | 40.717.037 | 83.88 |
| | | | 1.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 2 | 2 | 100.00 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 3.430.000 | 2.148.000 | 62.62 |
| | | | 1.2 | Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 8 | 8 | 100.00 | Reviu Laporan Kinerja | 2.000.000 | 1.175.280 | 58.76 |
| | | | 1.3 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 8 | 8 | 100.00 | Pengawasan Desa | 12.335.040 | 10.575.503 | 85.74 |
| | | | 1.4 | Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Kesepakatan | 1 | 1 | 100.00 | Kerjasama Pengawasan Internal | 200.000 | 142.500 | 71.25 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|-------------|-------------------|-----------|----------|---|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 1.5 | Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 8 | 8 | 100.00 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 30.576.400 | 26.675.754 | 87.24 |
| | | | 2 | Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 30 | 33 | 110.00 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 31.442.200 | 25.688.203 | 81.70 |
| | | | 2.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 30 | 33 | 110.00 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 31.442.200 | 25.688.203 | 81.70 |
| 3 | Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | 3 | Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Laporan | 4 | 4 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2.661.000 | 2.521.700 | 94.77 |
| | | | 3.1 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 550.000 | 485.100 | 88.20 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------|---|--|-------------|-------------------|-----------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 3.2 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 2.111.000 | 2.036.600 | 96.48 |

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga telah tercapai sesuai rencana target tahunannya di Triwulan IV.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Rencana kerja atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III dan IV sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas pengawasan desa yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tindak lanjutnya di awal tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut atas pengawasan kinerja yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjutnya karena pelaksanaan aktivitas telah selesai di Triwulan II dan monitoring tindak lanjut rekomendasinya juga telah terselesaikan di Triwulan III

Pengawasan Desa

Tindak lanjutnya di awal tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut atas pengawasan desa yang dilakukan di Bulan Desember 2025

Kerjasama Pengawasan Internal

Tindak lanjut hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang dan telah dilaksanakan di Triwulan III dan tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan monitoring tas rekomendasi/ catatan hasil telaah intern pada bidang terkait yang juga telah terlaksana sehingga tidak dibutuhkan tindak lanjut lagi di tahun 2026.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah terselesaikan 100% di triwulan IV tahun 2025 sehingga tidak dibutuhkan lagi tindak lanjutnya di 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tindak lanjutnya melakukan monitoring tindak lanjut atas aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melakukan monitoring tindak lanjut atas pengawasan khusus yang baru dilaksanakan di Bulan Desember 2025 sehingga masih dibutuhkan monitoring tindak lanjutnya di awal tahun 2026

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 telah dilaksanakan di Triwulan IV sehingga tidak dibutuhkan lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Wonogiri, 07 Januari 2026

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat



SARDJITO, S.Sos.M.H
196801071994031010



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: SRIYONO, S.Sos, M.M

Jabatan Pelapor

: Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, S.E

Jabatan Pimpinan Pelapor

: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------|--|---|---------|-------------------|-----------|----------|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT | Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT | 1 | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Laporan | 28 | 28 | 100.00 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 19.995.040 | 17.147.500 | 85.76 |
| | | | 1.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 2 | 2 | 100.00 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 3.430.000 | 2.300.000 | 67.06 |
| | | | 1.2 | Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 9 | 9 | 100.00 | Reviu Laporan Kinerja | 2.000.000 | 1.825.000 | 91.25 |
| | | | 1.3 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 8 | 8 | 100.00 | Pengawasan Desa | 12.335.040 | 11.030.000 | 89.42 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|-------------|-------------------|-----------|----------|---|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 1.4 | Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 8 | 8 | 100.00 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2.030.000 | 1.850.000 | 91.13 |
| | | | 1.5 | Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Kesepakatan | 1 | 1 | 100.00 | Kerjasama Pengawasan Internal | 200.000 | 142.500 | 71.25 |
| | | | 2 | Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 28 | 29 | 103.57 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 15.000.000 | 12.880.200 | 85.87 |
| | | | 2.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 28 | 29 | 103.57 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 15.000.000 | 12.880.200 | 85.87 |
| 3 | Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | 3 | Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Laporan | 4 | 4 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2.661.000 | 2.521.700 | 94.77 |
| | | | 3.1 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 2.111.000 | 2.036.600 | 96.48 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------|--|---|-------------|-------------------|-----------|----------|---|---------|-----------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 3.2 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 550.000 | 485.100 | 88.20 |

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga telah tercapai sesuai rencana target tahunannya di Triwulan IV.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga telah tercapai sesuai rencana target tahunannya di Triwulan IV.

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III dan IV sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan R^eviu atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya.

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai melebihi target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas pengawasan desa yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sudah tidak ada tindak lanjutnya karena pelaksanaan telah terselesaikan di Triwulan IV.

Reviu Laporan Kinerja

Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKjIP yang sebagian telah dilaksanakan di Triwulan III dan telah dilanjutkan di Triwulan IV untuk yang belum dilakukan monitoring tindak lanjutnya sehingga tidak ada tindak lanjutnya lagi di tahun 2026

Pengawasan Desa

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas pengawasan desa yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Target telah terselesaikan di Triwulan IV seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan tidak ada lagi tindak lanjutnya di tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang di Triwulan IV dan telah terlaksana 100%

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tindak lanjutnya melakukan monitoring tindak lanjut atas aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Target terselesaikan di Triwulan IV melebihi target tahunannya dan tidak ada lagi tindak lanjutnya di tahun 2026 karena pelaksanaan pengawasan telah terselesaikan untuk PKPT Tahun 2025.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% dan tidak ada lagi tindak lanjutnya.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada tindak lanjutnya karena penyusunan PKPT telah terselesaikan di Tahun 2025

Wonogiri, 07 Januari 2026

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan



SRIYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M

Jabatan Pelapor

: Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, S.E

Jabatan Pimpinan Pelapor

: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------|---|--|---------|-------------------|-----------|----------|---|------------|------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT | Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT | 1 | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Laporan | 25 | 25 | 100.00 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 18.609.480 | 16.935.000 | 91.00 |
| | | | 1.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 9 | 9 | 100.00 | Reviu Laporan Kinerja | 2.000.000 | 1.210.000 | 60.50 |
| | | | 1.2 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 6 | 6 | 100.00 | Pengawasan Desa | 11.461.280 | 11.132.500 | 97.13 |
| | | | 1.3 | Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 8 | 8 | 100.00 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2.030.000 | 1.950.000 | 96.06 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|---|---|-------------|-------------------|-----------|----------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 1.4 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 1 | 100.00 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 2.918.200 | 2.500.000 | 85.67 |
| | | | 1.5 | Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Kesepakatan | 1 | 1 | 100.00 | Kerjasama Pengawasan Internal | 200.000 | 142.500 | 71.25 |
| | | | 2 | Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 10 | 10 | 100.00 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 55.000.000 | 36.678.000 | 66.69 |
| | | | 2.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 10 | 10 | 100.00 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 55.000.000 | 36.678.000 | 66.69 |
| 3 | Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan | 3 | Tersusunnya laporan pendampingan & Asistensi | Jumlah laporan pendampingan & Asistensi | Laporan | 4 | 4 | 100.00 | Pendampingan dan Asistensi | 151.021.200 | 148.300.700 | 98.20 |
| | | | 3.1 | Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 4 | 4 | 100.00 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 151.021.200 | 148.300.700 | 98.20 |

| No | Sasaran Program Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------|---|--|-------------|-------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-------|
| | | | No | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 4 | Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Laporan | 4 | 4 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2.661.000 | 2.521.700 | 94.77 |
| | | | 4.1 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 550.000 | 485.100 | 88.20 |
| | | | 4.2 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 2 | 2 | 100.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 2.111.000 | 2.036.600 | 96.48 |

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga telah tercapai sesuai target tahunannya di Triwulan IV.

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III dan IV sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektor Pembantu untuk melaksanakan Rencana kerja atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Pendampingan dan Asistensi

Kerjasama yang baik antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan monitoring MCSP-KPK di Triwulan IV dan monitoring evaluasi perluasan desa anti korupsi

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendampingan dan Asistensi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas pengawasan desa yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025.

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjutnya di tahun 2026 karena pelaksanaan evaluasi AKIP beserta monitoring tindak lanjutnya telah terselesaikan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Pengawasan Desa

Penyelesaian monitoring tindak lanjut rekomendasi pengawasan desa yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025 sehingga monitoring tindak lanjutnya dilakukan di awal tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di tahun 2026 karena target atas tindak lanjut di tahun 2025 telah tercapai 100%.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya lagi

Kerjasama Pengawasan Internal

Tindak lanjut hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanakan reviu/telaah intern antar bidang dan telah dilaksanakan di Triwulan III dan tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan monitoring tas rekomendasi/ catatan hasil telaah intern pada bidang terkait yang juga telah terselesaikan di Triwulan IV sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya di tahun 2026.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tindak lanjutnya melakukan monitoring tindak lanjut atas aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan di Bulan Desember 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tindak lanjutnya di awal tahun 2026 adalah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas pelaksanaan audit investigasi di bulan Desember 2025.

Pendampingan dan Asistensi

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Semua kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi seperti pengendalian gratifikasi, monitoring MCSP, pelaksanaan SPI dan monitoring desa perluasan anti korupsi telah terselesaikan di Triwulan IV Tahun 2025 sehingga tidak tindak lanjutnya di tahun 2026 adalah melakukan evaluasi dan penyelesaian tindak lanjut atas hasil kegiatan tersebut seperti laporan SPI yang tentunya masih membutuhkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari laporannya.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada lagi tindak lanjut atas penyusunan PKPT karena telah terselesaikan di Triwulan IV Tahun 2025

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Wonogiri, 07 Januari 2026

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi



ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
197006201994012001



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M
Jabatan Pelapor : Kepala Sub Bagian Keuangan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MULYANTO, S.E.
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Kegiatan Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|--|---|-------------|-------------------|-----------|----------|---|---------------|---------------|-------|
| | | | No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun | Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun | 1 | Terealisasinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/bulan | 41 | 42 | 102.44 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.492.023.755 | 6.096.109.942 | 81.37 |
| | | | 2 | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 100.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.000.000 | 975.000 | 97.50 |
| | | | 3 | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 13 | 13 | 100.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 1.000.000 | 975.000 | 97.50 |

B. FAKTOR PENDUKUNG

| |
|--|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Ketersediaan data yang didukung oleh kerjasama pegawai mempercepat penyelesaian laporan keuangan |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
| Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan IV karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Menjalankan aktivitas keuangan mengikuti aturan yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dengan BPKD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan I sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD telah terselesaikan di Triwulan IV

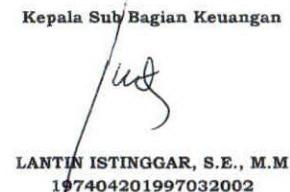
Wonogiri, 31 Desember 2025

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010

Kepala Sub Bagian Keuangan



LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M
197404201997032002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: MURNI HASTUTI, S.E., M.M

Jabatan Pelapor

: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MULYANTO, S.E.

Jabatan Pimpinan Pelapor

: Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

| No | Sasaran Kegiatan Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---|---|---------|---|--|---------|-------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-------|
| | | | No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| 1 | Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 100.00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.055.000 | 950.000 | 90.05 |
| | | | 2 | Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 100.00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.400.000 | 1.349.750 | 96.41 |
| 3 | Terselenggaranya administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun | Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun | 3 | Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik | Dokumen | 5 | 5 | 100.00 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 999.940 | 979.100 | 97.92 |
| 4 | Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian | Persentase tertib administrasi kepegawaian | 4 | Terealisasinya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 8 | 8 | 100.00 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 999.860 | 989.500 | 98.96 |
| | | | 5 | Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 24 | 24 | 100.00 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2.000.000 | 1.891.000 | 94.55 |

| No | Sasaran Kegiatan Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|--|--|---------|---|---|---------|-------------------|-----------|----------|--|-------------|-------------|-------|
| | | | No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 6 | Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 12 | 12 | 100.00 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1.999.810 | 1.775.300 | 88.77 |
| | | | 7 | Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 4 | 4 | 100.00 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 999.860 | 991.860 | 99.20 |
| | | | 8 | Terealisasinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 50 | 50 | 100.00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 148.346.600 | 139.835.050 | 94.26 |
| 9 | Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah | Percentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah | 9 | Terealisasinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100.00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.997.000 | 1.990.000 | 99.65 |
| | | | 10 | Terealisasinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100.00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54.999.110 | 49.879.850 | 90.69 |
| | | | 11 | Terealisasinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100.00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.795.200 | 650.000 | 36.21 |
| | | | 12 | Terealisasinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100.00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6.499.800 | 6.111.000 | 94.02 |
| | | | 13 | Terealisasinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100.00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.999.980 | 11.857.900 | 59.29 |
| | | | 14 | Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100.00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000 | 2.290.000 | 95.42 |

| No | Sasaran Kegiatan Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---|---|---------|--|--|---------|-------------------|-----------|----------|--|-------------|-------------|-------|
| | | | No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 15 | Terealisasinya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 20 | | 0.00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.048.000 | 7.885.000 | 97.97 |
| | | | 16 | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 15 | 15 | 100.00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 37.575.000 | 27.342.296 | 72.77 |
| | | | 17 | Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 100.00 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 999.150 | 715.000 | 71.56 |
| | | | 18 | Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100.00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 999.860 | 984.500 | 98.46 |
| 19 | Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah | 19 | Terealisasinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 6 | 6 | 100.00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 113.820.000 | 107.680.000 | 94.61 |
| | | | 20 | Terealisasinya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 3 | 100.00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.865.700 | 5.460.000 | 93.08 |
| 21 | Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 21 | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100.00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 1.994.000 | 99.70 |
| | | | 22 | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100.00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 47.300.000 | 36.708.701 | 77.61 |

| No | Sasaran Kegiatan Atasan | Indikator | Kinerja | | | | | | Keuangan | | | | |
|----|---|---|---------|--|--|---------|-------------------|-----------|----------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan 4 | Realisasi | (%) | Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | (%) |
| | | | 23 | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100.00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.000.000 | 8.722.143 | 96.91 |
| | | | 24 | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100.00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 192.833.900 | 151.862.000 | 78.75 |
| 25 | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah | Percentase pemeliharaan barang milik daerah | 25 | Terealisasinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100.00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 19.694.270 | 18.688.043 | 94.89 |
| | | | 26 | Terealisasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 11 | 11 | 100.00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 93.188.617 | 84.583.769 | 90.77 |
| | | | 27 | Terealisasinya Mebel yang Dipelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 3 | 3 | 100.00 | Pemeliharaan Mebel | 2.000.000 | 1.520.000 | 76.00 |
| | | | 28 | Terealisasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 10 | 100.00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.990.000 | 4.949.600 | 99.19 |
| | | | 29 | Terealisasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 100.00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.704.000 | 6.417.500 | 95.73 |

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Telah tercapai target tahunannya di Triwulan IV untuk penyusunan dokumen perencanaan, yaitu Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 dan dokumen penganggaran yaitu RKA Tahun 2026

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan data informasi dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Tahun 2024

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Ketertiban pencatatan dan monitoring atas Barang Milik Daerah pada Inspektorat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Ketersediaan data informasi terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Ketersediaan anggaran dan SDM dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan rutin bulanan dalam pemenuhan penyediaan bahan bacaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan rutin bulanan dalam pemenuhan penyediaan fasilitasi tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Ketersediaan tempat arsip dan kelengkapan dokumen yang akan diarsipkan dalam penatausahaan arsip

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Ketersediaan dokumen yang akan didigitalkan menjadi dokumen elektronik untuk diunggah di laman resmi instansi sebagai indikator penilaian pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilakukan penilaiannya oleh Diskominfo Kabupaten Wonogiri

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Koordinasi dan monitoring dengan pejabat pengadaan yang baik sehingga realisasi dapat tercapai sesuai rencananya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Koordinasi dan monitoring dengan pejabat pengadaan barang yang baik sehingga realisasinya dapat terpenuhi sesuai dengan rencananya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat di SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan air, telepon, internet dan listrik di SKPD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Ketersediaan anggaran untuk membayar gaji Non ASN dan pemenuhan kebutuhan perabot kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan untuk pimpinan SKPD dan Sekretaris

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan lapangan untuk operasional kantor

Pemeliharaan Mebel

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin SKPD

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Selama ini PPKom dijabat oleh auditor dengan beban kerja yang cukup banyak sehingga sering terjadi keterlambatan pengajuan proposal pengadaan ke pejabat pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selama ini masih terbatas untuk SDM yang memiliki sertifikat terkait PBJ sehingga PPKom masih dijabat oleh auditor dengan beban kerja yang tinggi sehingga masih sering terjadi keterlambatan pengajuan pengadaan barang ke pejabat barang karena banyaknya pekerjaan pengawasan yang prioritas.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan Mebel

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan IV sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target tahunan telah tercapai di Triwulan IV dan sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan I sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena telah terselesaikan di Triwulan IV

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena terget tahunan telah tercapai di Triwulan IV

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya karena penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawai telah terselesaikan di Triwulan IV

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawai

Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawai telah terselesaikan di Triwulan IV dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai telah terselesaikan di Triwulan IV sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sudah tidak ada tindak lanjutnya karena anggaran telah terserap sesuai rencana kebutuhan sampai dengan Triwulan IV

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran telah terselesaikan dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran sudah terlaksana dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran telah terselesaikan dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran telah terlaksana dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pemenuhan penyediaan bahan bacaan di Triwulan IV sesuai anggaran yang ada telah terselesaikan dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pelaksanaan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu di Triwulan IV dengan menyesuaikan sisa anggaran yang masih ada telah terselesaikan dan sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Triwulan IV telah tercapai sesuai targetnya dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Target tahunan telah tercapai dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Telah tercapai sesuai target tahunannya dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target tahunan telah terpenuhi 100% di Triwulan IV sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target tahunannya telah terpenuhi di Triwulan IV sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

realisasi sesuai rencana di Triwulan IV Tahun 2025 dalam Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah memenuhi target tahunannya sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Triwulan IV telah terselesaikan dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di triwulan IV telah terselesaikan sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di triwulan IV telah terselesaikan sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak di Triwulan IV dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada untuk kendaraan dinas jabatan telah terselesaikan sehingga tidak ada lagi tindak lanjutnya di tahun 2025

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak di Triwulan IV dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada untuk kendaraan dinas lapangan untuk operasional kantor telah terselesaikan dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pemeliharaan Mebel

Penyediaan jasa pemeliharaan mebel di Triwulan IV dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada telah terselesaikan dan sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Triwulan IV telah terselesaikan dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pelaksanaan pemeliharaan BMD gedung kantor dan bangunan lainnya di Triwulan IV telah terselesaikan dan tidak ada lagi tindak lanjutnya

Wonogiri, 07 Januari 2026

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MURNIASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003